



Bed Pasien Covid Kian Menipis

JOGJA—Peningkatan jumlah pasien positif Covid-19 di DIY membuat kapasitas tempat tidur di rumah sakit rujukan hampir penuh.

Catur Dwi Janati, Abdul Hamid Razak
& Luqas Subarkah
redaksi@harianjogja.com

Data dari Dinas Kesehatan DIY menunjukkan terjadi lonjakan penggunaan tempat tidur di rumah sakit rujukan pasien Covid-19 dalam dua pekan terakhir. Pada 16 November, penggunaan bed nonkritikal tercatat 244 bed atau secara persentase sebanyak 60%. Namun, pada 28 November penggunaan sudah mencapai 364 bed atau 90%. Sementara untuk bed kritikal pada 16 November baru terpakai 28 bed (58%) melonjak menjadi 39 bed atau 80% pada 28 November.

Kepala Dinas Kesehatan DIY Pembajun Setyaningastutie menjelaskan pada pekan ini terjadi kenaikan kasus tertinggi yakni 646 kasus.

"Memang terjadi satu dua penurunan kasus selama dua pekan, akan tetapi tidak sebanding dengan banyaknya kasus baru yang membutuhkan tempat tidur nonkritikal. Pelonjakan kasus akan makin kentara jika melihat persentase kapasitas tempat tidur nonkritikal yang

► Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, kasus positif cukup banyak di usia produktif.

► DIY akan mendapat kuota 2,2 juta vaksin pada tahap pertama.

awalnya 60 persen pada 16 November menjadi 90 persen pada 28 November atau naik sebanyak 30 persen," kata Pembajun dalam diskusi *Sonjo Angkringan*, Minggu (29/11).

Pembajun menambahkan hingga 28 November tempat tidur kritikal yang terpakai sebanyak 39 buah atau 80% dari kapasitas yang ada. Bahkan ada 10 pasien yang meninggal sebelum mendapat tempat rujukan.

Pembajun menerangkan jika dilihat berdasarkan kelompok umur, kasus positif cukup banyak ada di usia produktif. "Sebenarnya usia produktif yang belakangan ini harus kita edukasi dan literasi. Kasus konfirmasi berdasarkan umur sampai pekan ke-37 paling banyak usia 21-30 ada 1.094 kasus," ujarnya.

Dari total 144 kasus meninggal dunia, 63% di antaranya memiliki komorbid. Diabetes melitus menjadi komorbid terbanyak penyebab kematian yakni 48 kasus, disusul hipertensi 39 kasus dan jantung 15 kasus.

► Halaman 11



1.
2.
3.
4.
5.

ujut

ggapi

ahui

Yogyakarta, ...
Korona

Bed Pasien...

Pembalut kembali diperlakukan adanya peningkatan operasi penegakan hukum di kabupaten/kota untuk mengatasi lonjakan kasus. "Perlu ada sanksi yang memberi efek jera," ungkapnya. Selain itu, pasien tanpa gejala tidak perlu dibawa ke rumah sakit.

Direktur Utama RSUP Prof Dr. Sardjito, Rukmono Siswihanto menyoreti kebutuhan pelayanan kritikal yang terus meningkat. "Pelayanan kritikal tidak selalu terkait ventilator. Memang ventilator masih menjadi kebutuhan, tetapi pasien kritikal itu tidak semata-mata ventilator tetapi bagaimana pasien-pasien yang mengalami komplikasi Covid itu semakin meningkat," terang Rukmono.

Alokasi Vaksin

Di sisi lain, Pembujin mengatakan DIY akan mendapat kuota 2,2 juta vaksin pada tahap pertama. Meski demikian, ia menegaskan data ini belum final. Ia juga belum bisa memprediksi target realisasi vaksin.

"Harus dipahami, data belum fiks, data terus berjalan, artinya bisa semakin banyak atau berkurang. Tergantung kriteria, jumlah penduduk yang 18 tahun-59 tahun, tidak memiliki komorbid, tidak pernah terpapar Covid-19, dan tidak sedang menderita penyakit infeksi," jelasnya.

Terkait dengan penuntukan vaksin, ia menjelaskan pihaknya masih menunggu juknis dari Pemerintah Pusat. "Informasi yang kami dapatkan sementara adalah satu orang itu dua vaksin, diberikan dengan periode tertentu. Dengan adanya juknis itu, kami akan melaksanakan sesuai dengan prosedurnya," katanya.

Pembujin berharap segera bisa dilaksanakan simulasi, semisal lebih bagaimana pengiriman vaksin tersebut, siapa yang harus mengamankan, siapa yang harus melaksanakan atau vaksinatornya, institusinya, teknis setelah divaksin dan lain sebagainya.

Dia mengingatkan dengan adanya vaksin, bukan berarti penerapan protokol kesehatan lantas diabaikan. "Setelah vaksinasi itu juga tidak bisa kita kembali seperti dulu lagi, harus tetap memperhatikan protokol kesehatan," ujarnya.

Kepala Dinas Kominfo DIY Rony Primanto Hari menuturkan sejauh ini Pemda DIY masih menunggu datangnya vaksin sembari melakukan persiapan, seperti sosialisasi dan sebagainya. "Sebab saat ini, pemahaman soal vaksinasi masih kurang. Jadi perlu diadakan edukasi terkait dengan vaksin," tuturnya.

Kementerian Kominfo kata dia, akan menyiapkan basis data yang nantinya digunakan sebagai saran untuk vaksin, supaya tidak ada penyalahgunaan vaksin agar vaksin dapat menyebar merata

sesuai dengan peruntukannya. Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19, Berty Murtiningsih menyebutkan ada tambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 139 kasus pada Minggu (29/11).

"Total kasus positif Covid-19 di DIY menjadi sebanyak 5.922 kasus," katanya.

Berdasarkan domisilinya penambahan kasus itu berasal dari Kabupaten Sleman (55 kasus), Bantul (31 kasus), Kulonprogo (22 kasus), dan Gunungkidul (17 kasus). "Penambahan kasus di Kota Jogja paling sedikit, 14 kasus," jelas Berty.

Berdasarkan rincian riwayatnya, Berty menerangkan mayoritas penambahan konfirmasi positif berasal dari riwayat *tracing* kontak yakni 58, sedangkan 36 kasus dari riwayat periksa mandiri, satu kasus dari riwayat perjalanan dari luar daerah, dan satu kasus terjarang dari riwayat *screening* pekerjaan. "Sementara itu sebanyak 38 kasus masih ditelusuri riwayatnya," ujarnya.

Kasus sembuh pasien pada Minggu cukup banyak. Berty menjelaskan ada 59 kasus yang dinyatakan sembuh dengan rincian dari Sleman (21 kasus), Bantul (12 kasus), Kota Jogja (tujuh kasus), Gunungkidul (sembilan kasus), dan Kulonprogo (satu kasus). "Total kasus sembuh menjadi sebanyak 4.333 kasus," ujarnya. Tercatat satu pasien asal Bantul dengan komorbid pneumonia meninggal dunia sehingga menambah jumlah kasus meninggal dunia di DIY menjadi 145 kasus.

Pelanjutan kasus konfirmasi positif Covid-19 yang terjadi membuat kapasitas tempat tidur rumah sakit rujukan nyaris penuh. Berty menyebutkan dari 49 tempat tidur kritikal yang tersedia, saat ini 40 tempat tidur telah digunakan hanya menyisakan sembilan tempat tidur. "Untuk total tempat tidur nonkritikal yang dimiliki yakni 414 tempat tidur, 400 di antaranya sudah terisi, hanya menyisakan 14 tempat tidur," ujarnya.

Pemulangan Santri

Sementara itu, penambahan kasus Covid-19 dari lembaga pendidikan (pesantren) di Sleman beberapa hari lalu, membuat Pemda DIY meminta ponpes untuk memulangkan santri yang sehat. Sebagai gantinya, pesantren mulai menerapkan sistem pembelajaran secara daring.

Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DIY, Fahmi Akbar Idris, mengatakan usulan Pemda DIY tersebut masih akan dikaji oleh Rabbithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) salah satu perangkat departemen organisasi lembaga Nahdlatul Ulama. "Saat ini sedang dipantau dan diinventarisasi

oleh RMI. Setelah itu baru akan dikoordinasikan dengan PWNU," kata Fahmi.

Fahmi masih akan menunggu hasil dari kajian yang dilakukan RMI sebelum memutuskan keberlanjutan proses belajar dan mengajar di pondok pesantren selama masa pandemi Covid-19 ini. Menurutny, ponpes yang santrinya terpapar langsung ditangani sesuai dengan protokol kesehatan. "Pesantren juga berkoordinasi dengan Satgas setempat. Jadi kalau Satgas merekomendasikan [laporan rekomendasinya], insyaallah pesantren akan memperhatikan," katanya.

Kepala Kantor Kemenag Sleman, Sa'ban Nuroni, mengatakan masih belum menerima informasi terkait dengan usulan dari Pemda DIY tersebut. Jika memang Pemda DIY mengimbau demikian, ide tersebut akan dibahas lebih lanjut. "Sampai hari ini [kenarni] saya belum mengetahui adanya imbauan tersebut. Kalau pun ada, semestinya akan dibahas di kalangan pesantren. Usulan itu baik tetapi sepertinya masih belum diputuskan," katanya.

Menurut Sa'ban, kasus-kasus Covid-19 di ponpes terjadi di ponpes yang memiliki lembaga pendidikan formal, baik MTs maupun MA. Kasus-kasus Covid-19 di pesantren, katanya terjadi di ponpes yang memang memiliki banyak santri, seperti di Prambanan, Ngatik, Moyudan dan terakhir Gamping.

Sebelum membuka proses belajar mengajar kemudian mendapat rekomendasi dari Satgas Covid-19, katanya, pengelola ponpes lebih dulu mendapatkan pendampingan. "Setiap ponpes memiliki Satgas Covid-19. Mereka yang mengawasi penerapan protokol kesehatan [proses]. Ini juga menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan rekomendasi," kata Sa'ban.

Sebenarnya, lanjut dia, penerapan proses di masing-masing ponpes berjalan dengan baik. Hanya saja, karena jumlah santri yang diawasi banyak, ada satu atau dua orang yang mungkin luput dari pantauan. Kondisi tersebut memicu munculnya penularan kasus Covid-19. "Tentu saja kami terus melakukan evaluasi-evaluasi agar kasus yang sama tidak terulang lagi," katanya. Kepala Dinkes Sleman Joko Hastaryo mengatakan berdasarkan hasil rapat pada Kamis (26/11) ponpes memang hanya diminta untuk menerapkan proses secara ketat. Selain itu, ponpes juga diminta menyediakan tempat untuk ruang isolasi mandiri. "Kalau kebijakan Pemda DIY seperti itu sebetulnya kami setuju, mudah-mudahan segera ada surat tertulis dari Pemda DIY sehingga bisa ditindak lanjuti. Pemkab Sleman tentu akan mengikuti Pemda DIY," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005